

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari paparan diatas penulis menyimpulkan dari tiga bentuk dominasi yang paling dominan adalah dominasi birokrasi yaitu ASN atau PNS dibawa kendali atau intruksi dari pemerintah daerah dalam hal ini partai Golkar karna memang dari awal pengangkatan jabatan berdasarkan kontrak politik. Sehingga peristiwa mutasi jabatan pasca pemilukada diwarnai dengan tidak profesionalitasnya seorang Bupati dalam pengangkatan kabinet kerja karna yang jadi prioritas adalah tim suksesi pemenang pemilukada sedangkan birokrasi yang tidak ikut serta menyukseskan kemenangan Bupati yang terpilih akan digeser bahkan diberhentikan dari jabatannya dan yang kawan politik dimutasi kejabatan yang lebih strategis.
2. Bentuk-bentuk dari dominasi kekuasaan Golkar di Kabupaten Bone sampai saat ini yaitu pertama **Dominasi Birokrasi** kurangnya netralitas, adil dan profesionalitas dalam menjalankan tugas ASN yang sesungguhnya. Karena banyaknya tim kemenangan dari Partai Golkar yang duduk sebagai kabinet kerja dan mendapatkan jabatan yang strategis dipemerintahan daerah Kabupaten Bone. Kedua **Dominasi Sosial** adalah adanya politik kekerabatan antara Partai penguasa dengan klan-klan yang besar di Bone. Orang-orang yang besar di Golkar cenderung membesarkan klannya untuk diajukan pada pemilihan yang akan datang. Ketiga **Dominasi politik** adalah ada beberapa kebijakan-kebijakan publik yang cenderung untuk kepentingan-kepentingan Partai penguasa semata. kemudian dominasi politik Golkar di Bone khususnya

di DPRD adanya dukungan dari Partai pengusung untuk pemerintah sehingga kurangnya *Chek and Blance* antara legislatif dan eksekutif.

3. Dampak dari dominasi Partai Golkar di Kabupaten Bone ada tiga poin yaitu; pertama **Eksplorasi Kekuasaan** dari Partai Golkar adalah adanya sinergitas antara DPRD dan Bupati karena berasal dari Partai yang sama, maka dampaknya adalah keluarnya kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan bagi Partai dan kelompoknya. Kedua **Penetrasi Kekuasaan** adanya tekanan dan ancaman dari atasan pemerintah daerah Kabupaten Bone terhadap bawahannya yaitu ASN, Kepala Dinas, Camat, Lurahh, dan kepala desa. untuk menjaga kekuasaanya agar setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Bawahan harus mendukung dan patuh terhadap kebijakan tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan cita-cita dari pemerintah. Ketiga **Hegemoni Kekuasaan** akan selalu terjadi tekanan politik terhadap birokrasi, perangkat desa, lurah, dan camat demi untuk mempertahankan kekuasaanya. strategi yang digunakan Golkar agar tetap eksis sebagai Partai penguasa yaitu pola pengkaderan dan mengajak simpatisan mengakar sampai kebawa. Hegemoni kekuasaan Golkar masih menggunakan cara orde baru dapat mengajak dan mempertahankan simpatisan hingga ke pelosok desa dengan cara melibatkan simpatisan dari tokoh-tokoh masyarakat mulai dari kepala desa, kepala dusun, tokoh-tokoh agama, petani, nelayan, dan pengusaha sehingga masih kokoh sampai sekarang. Dengan hegemoni kekuasaan Golkar di Bone yang bergerak sampai ke pelosok desa beberapa Partai lain tidak leluasa melakukan perekrutan kader ataupun mengajak simpatisan Partai. Melalui ini berarti beberapa politisi memiliki ketergantungan terhadap Partai Golkar.

B. Saran

1. Sebagai Partai Politik Golkar yang dewasa yang memiliki pengalaman panjang disetiap pesta demokrasi harus menjadi cerminan praktek politik sehat. jika kembali melihat demokrasi kita yang menganut ideologi terbuka maka dalam prakteknya setiap warga negara memiliki hak yang sama.
2. Partai Politik baru harus banyak melakukan sosialisasi politik terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki pola pikir yang baru dan tidak dugma terhadap partai penguasa. Sebagai Partai politik yang baru harus memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat jangan justru merasa dibatasi dari partai penguasa.
3. Kepala daerah sebagai kepala kepegawaian daerah yang memiliki wewenang sepenuhnya mutasi, memindahkan, dan memeberhentikan ASN dan Camat/lurah. Kepala daerah harus merekrut atau mengangkat secara professional yang sesuai kebutuhan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan rakyat.
4. Birokrasi (ASN), Camat dan Lurah/Depala Desa harus menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. Jika ada keberpihakan terhadap atasan dan ikut serta dalam politik praktis hal ini merupakan ketidaktaatan terhadap undang-undang sebagai dasar hukum.
5. Saran penelitian ini lebih menarik jika dilanjutkan untuk peneliti selanjutnya dengan mendalami bagaimana persaingan politik klan di Kabupaten Bone.
6. Hambatan penelitian minim mendapatkan nara sumber yang memang mengikuti perkembangan politik di Kabupaten Bone dan masi beberapa jawaban saya temukan beda dengan realitas yang terjadi. Maka peniliti selanjutnya lebih meminta jawaban yang objektif.

